

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pariwisata dunia kian pesat seiring dengan berkembangnya gaya hidup manusia yang semakin modern dan kebutuhan akan menyenangkan diri sendiri semakin tinggi. Kebutuhan manusia untuk mendapatkan hiburan di tengah kesibukan bekerja dapat dipenuhi dengan melakukan kegiatan wisata. Banyak wisatawan yang melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk berwisata dan menikmati suasana yang tidak didapat di negaranya. Aktivitas wisatawan tersebut dapat menimbulkan dampak di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pariwisata merupakan salah satu penyebab bergeraknya perekonomian masyarakat di negara tujuan wisata yang disebabkan oleh meningkatnya industri pariwisata. Negara-negara di dunia pun telah melakukan upaya peningkatan pengelolaan pariwisata guna kesejahteraan masyarakatnya, termasuk Indonesia.²

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keindahan, sumber daya alam yang beranekaragam, budaya dan adat istiadat, tengah berupaya untuk lebih berkembang dan lebih mampu mengelola potensi wisatanya. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Undang-

²Sumiasih Kadek, Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung), 2018, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.4

Undang Kepariwisataan)³ menyatakan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Kepariwisataan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak komponen pariwisata.

Terdapat prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, diantaranya adalah memberdayakan masyarakat setempat. Prinsip tersebut menjadi pedoman baik oleh pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pariwisata di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pasal 23 huruf b Undang-Undang Kepariwisataan juga mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari ketidakmampuan pada segi ekonomi, keterbelakangan dan kesenjangan.⁴

³ Suparta, I Ketut, Pengawasan terhadap Pramuwisata Bali, *Jurnal Udayana*, 2013, No. 1

⁴ Rudy Dewa Gde dan Mayasari I Dewa Ayu Dwi, *Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009*, 2019, Kertha Wicaksana

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata bisa dalam hal menjalankan usaha pariwisata atau sarana pariwisata, seperti daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, spa serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Kontribusi masyarakat dalam mengelola unit-unit pendukung kegiatan pariwisata seperti usaha cinderamata, penukaran uang (*money changer*), bank serta jaringan ATM nya, klinik kesehatan, usaha telekomunikasi, serta lembaga-lembaga pendidikan maupun kebudayaan juga sangat diperlukan dalam pengelolaan pariwisata dibutuhkan baik di kota maupun di desa.⁵

Pengelolaan pariwisata di desa penting dilakukan mengingat desa kaya akan potensi wisata, alami, belum mengalami banyak perubahan dan terjaga keasliannya sehingga digemari oleh wisatawan. Desa menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

⁵ Suartha, N dan Sudrata I, *Industri Pariwisata Bali*, 2017, Jakarta: PT Raja Grafindo

Republik Indonesia.⁶ Dilihat dari topografinya, setiap desa memiliki keunikan masing-masing yang melalui potensinya dapat berkembang menjadi desa wisata.

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi sasaran kunjungan banyak wisatawan adalah Jawa Timur. Jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Timur setiap tahun terus meningkat. Sesuai data statistik dari Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, tercatat kedatangan wisatawan mancanegara pada tahun 2018 sejumlah 320.529 kunjungan, 2019 sejumlah 243.899 kunjungan, tahun 2020 ada 35.035, kunjungan dan 2021 sejumlah 689 kunjungan. Jumlah kedatangan wisatawan lokal tahun 2018 adalah 620.789 kunjungan, tahun 2019 sebanyak 511.978 kunjungan, tahun 2020 sebanyak 84.785 orang, dan 2021 sebanyak 2.092. Pariwisata di Jawa Timur memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebab sangat banyak desa di Jawa Timur yang memiliki potensi wisata. Sebagian besar masyarakat desa di Jawa Timur hidup dengan mengelola sektor pertanian, namun kini sudah mulai mengembangkan diri dengan mengelola sektor pariwisata. Masyarakat desa semakin giat melakukan inovasi-inovasi untuk menyajikan daya tarik wisata semenarik mungkin sehingga kegiatan pariwisata kian beragam.⁷

Potensi wisata desa di Jawa Timur salah satunya desa yang ada di Kabupaten Tulungagung khususnya Desa Tunggangri membutuhkan adanya

⁶ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <https://jatim.bps.go.id/publication.html> diakses pada 20 Februari 2023 pada jam 20.30

pengelolaan yang efektif, dalam hal ini dibutuhkan suatu lembaga atau badan usaha yang dapat mengelola potensi wisata tersebut serta memberdayakan masyarakat secara langsung, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. pengelolaan BUMDes optimal, maka desa akan menjadi desa-desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa.⁸ BUMDes salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Modal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), selain itu dibantu pula dengan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BUMDes terdiri dari unit-unit usaha, misalnya unit usaha simpan pinjam, pengelolaan sampah, desa wisata serta unit usaha lain sesuai dengan potensi yang ada di desa.

⁸ Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal Of Rulan And Developmen*, Universitas Ganesha Singaraja, Vol. 9 Nomor 2, hlm. 23

Penyertaan modal dari pemerintah desa dapat menjadi salah satu cara dalam proses pengembangan perekonomian yang ada di desa melalui BUMDesa.⁹ Berdirinya BUMDesa ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dengan mengembangkan potensi yang dimiliki supaya masyarakat mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada guna meningkatkan taraf hidup mereka. BUMDes "Srikandi" merupakan bumdes yang berada di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir, BUMDes ini telah memiliki beberapa unit usaha yang saat ini sudah berjalan seperti pengelolaan pasar desa, Pengelolaan jasa pengambilan sampah, pertagenlink, dan wisata kedunglele.

BUMDes Srikandi didirikan sebagai organisasi yang dibentuk atas kesepakatan bersama antara masyarakat desa memerlukan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya yang sistematis dan salah satunya adalah laporan manajemen laba. Penyajian informasi tentang posisi keuangan kinerja anggaran arus kas dan kinerja keuangan, entitas pelapor yang berguna bagi pengguna dalam memuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Keuntungan yang dimiliki oleh BUMDes akan digunakan kembali untuk kepentingan desa. Wisata kedunglele ini memiliki 9 kios yang nantinya akan dimanfaatkan untuk didirikan UMKM, atau memasarkan jajanan kuliner yang dapat berkembang positif kedepannya. Wisata Kedunglele ini nantinya mampu

⁹ Ababil Anas Arif, Yulistiyono Herry, Peran BUMDes dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Kehi sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Kertagena Daya, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan), 2022, *Jurnal Ilmiah Aset*, Vol.2, No. 2

meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mampu meningkatkan pengelolaan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu menjadi salah satu cara dalam proses pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Desa Tunggangri.¹⁰

Sebelum dibentuknya BUMDes Srikandi, masyarakat lebih tertarik bekerja di luar kota dan di luar negeri. Masalah BUMDes tersebut dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya kreatifitas masyarakat dalam mengelolah potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Petani misalnya hanya mengandalkan hasil pertaniannya saja dan para pedagang dalam mengembangkan usahanya para pedagang meminjam modal di koperasi, rentenir, atau bank dengan bunga yang lumayan tinggi sehingga mereka tidak dapat mengembangkan usahanya dan tidak pula mendapatkan penghasilan tambahan dikarenakan bunga yang terlalu tinggi.

Berdasarkan observasi awal, bahwa dari berbagai macam jenis unit usaha yang telah diprogram oleh BUMDes ternyata ada beberapa unit usaha yang belum berjalan baik dan perlu dikembangkan yaitu Wisata Kedunglele. Unit usaha Wisata Kedunglele ini merupakan unit usaha yang baru dikembangkan oleh BUMDes guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Wujud dari aset desa yang berada sebagai objek wisata dengan keragaman properti yang dimiliki desa menciptakan peluang besar bagi BUMDes untuk mengelolanya.

¹⁰ Hasil Observasi, Tanggal 11 Januari 2023

Pengelolaan Wisata Kedunglele ini cukup diminati oleh masyarakat terutama kalangan muda untuk bersantai. Para pengunjung biasanya menghabiskan waktunya tiga sampai lima jam untuk menikmati suasana ditempat tersebut. Lokasi Wisata Kedunglele sangat strategis dipinggir jalan dengan pemandangan sawah membuat pengunjung lebih betah berada ditempat dengan menghirup udara segar. Pengunjung harian dalam wisata yang masih berkembang ini tergolong cukup banyak dibanding wisata berkembang lain yang ada di Kabupaten Tulungagung misalnya Wisata Kedunglele dengan Wisata Alam Kandung dan Wisata Pasren Garuda. Berikut data perbandingan pengunjung antara Wisata Kedunglele dengan Wisata Alam Kandung dan Wisata Pasren Garuda.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pengunjung Objek Wisata

Bulan	Wisata Kedunglele	Wisata Alam Kandung	Wisata Pasren Garuda
Februari	290	257	217
Maret	310	215	200
April	350	220	245
Mei	363	200	218
Juni	376	210	220
Juli	382	190	180
Agustus	385	220	177
September	395	212	150
Oktober	400	204	145
November	420	250	130
Desember	450	300	100
Jumlah	4121	2478	1982

Sumber: Data Pokok BUMDes Per Desa

Data di atas menunjukkan jumlah pengunjung pada Februari-Desember 2022 Wisata Kedunglele mencapai 4121 pengunjung, untuk wisata alam kandung mencapai 2487 dan juga wisata pasren garuda mencapai 1982 pengunjung. Pada awal dibukanya Wisata Kedunglele mulai banyak orang yang mengunjungi, terlihat dari data di atas menunjukkan paling tinggi jumlah pengunjung dibandingkan dengan wisata alam kandung dan wisata pasren garuda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul "**Peran BUMDes Srikandi dalam Mengembangkan Wisata Kedunglele di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir**".

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang di dapat yaitu:

1. Bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa Srikandi untuk meningkatkan pengunjung dalam Wisata Kedunglele ?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pengembangan Wisata Kedunglele ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Badan Usaha Milik Desa Srikandi untuk meningkatkan pengunjung dalam Wisata Kedunglele.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam mengembangkan Wisata Kedunglele.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu dalam penelitian yang diteliti oleh penulis, hanya berkaitan dengan Peran BUMDes Srikandi dalam Mengembangkan Wisata Kedunglele. Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada "Peran BUMDes Srikandi dalam Mengembangkan Wisata Kedunglele di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir".

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmiah dari peneliti maupun pembaca terkait dengan Peran BUMDes Srikandi dalam Mengembangkan Wisata.

2. Secara Akademik

1. Bagi Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemahaman kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memilih mengembangkan Wisata Kedunglele.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul diatas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, berikut ini penulis sajikan penegasan istilah:

1. Pengertian Konseptual

a. Peran

Menurut Soekanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau

tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹¹ Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya.

Menurut Syani peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai status yang dimilikinya.¹² Seseorang dapat dikatakan berperanan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat, jika seseorang memiliki status sosial tertentu dalam kehidupan masyarakat maka selanjutnya ada kecenderungan akan muncul suatu harapan-harapan baru. Melalui harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan usaha dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peran dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang memiliki status tertentu dalam masyarakat.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2009, Edisi Baru: Rajawali Pers, Jakarta

¹² Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hlm. 94

b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. fungsi BUM Desa disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa.¹³

c. Pengembangan wisata

Pengembangan wisata adalah pengembangan suatu wilayah dalam upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki sehingga tercipta sesuatu yang lebih baru dari sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹⁴

2. Pengertian Operasional

Definisi operasionalnya adalah sebagai berikut: peran yakni perilaku BUMDes dalam mengembangkan Wisata Kedunglele di Desa Tunggangri sesuai program kerja yang dijalankan dalam operasional. BUMDes lembaga yang didirikan oleh Desa. fungsi BUMDes disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial.

¹³ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, 2019, Jakarta Selatan: UAI Press

¹⁴ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, 1997, Yogyakarta: Andi Offset

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari enam (6) bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai pereinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain, serta agar dalam pembahasan skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran singkat mengenai pembahasanyang ada didalam penelitian ini. Unsur-unsur dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini ini berisikan fokus pertama, kedua dan seterusnya, proporsi dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis akan mebahas proses penelitian yang digunakan dalam penulisan meliputi: pendekatan dan jenis penelitian lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian

Pembahasan pada bab ini peneliti akan menjawab fokus penelitian dan membahasnya secara mendalam dengan data yang telah diperoleh.

Bab V: Pembahasan

Pembahasan membahas tentang posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap di lapangan.

Bab VI: Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.